KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:5200-9881-3601-5128

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.539139/2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(005)	MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	:	(05)	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
3. Provinsi	:	(25)	PAPUA
4. Kode/Nama Satker	:	(539139)	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Sebesar	:	Rp. 87.730.000	(DELAPAN PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04	PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	87.730.000
005.05.BF.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp.	87.730.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	87.730.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 87.730.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5200-9881-3601-5128

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (25) PAPUA
Kode/Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			87.730.000
Kegiatan	:	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			87.730.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		2. 01	Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		3. 01	Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		4. 01	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		5. 02	Jumlah Jam Layanan Pos Bantuan Hukum			
		6. 02	Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan			
		7. 03	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan TUN			
		8. 04	Jumlah Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1059.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	12.000.000
Rincian Output	:	01 AEA.002	Dukungan Penyelesaian Perkara	1.00	kegiatan	12.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	1,00	Perkara, Berkas Perkara	405.000
Rincian Output	:	01 BCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1.00	Perkara	405.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	96,00	Orang	33.000.000
Rincian Output	:	01 QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PN)	96.00	Orang	33.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	1,00	Perkara, Berkas Perkara	42.325.000
Rincian Output	:	01 QCA.002	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara (PN)	1.00	Perkara	42.325.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5200-9881-3601-5128

Kementerian Negara/Lembaga	: (005)	MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi	: (05)	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi	: (25)	PAPUA
Kode/Nama Satker	: (539139)	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Perkara Hukum Perseorangan	Perkara, Berkas Perkara

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.

Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2025

DS:5200-9881-3601-5128

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (005)	MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi	: (05)	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi	: (25)	PAPUA
Kode/Nama Satker	: (539139)	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

							Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	87.730.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	87.730.000			(2) RPLN	US$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2025

DS:5200-9881-3601-5128

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (25) PAPUA
Kode/Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
539139	**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**	**-**	**87.730**	**-**	**-**	**-**	**87.730**		
005.05.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**87.730**	**-**	**-**	**-**	**87.730**		
1059	**Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara**	**-**	**87.730**	**-**	**-**	**-**	**87.730**		
1059.AEA	Koordinasi	-	12.000	-	-	-	12.000	25 . 51	
	(25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)								
01	RM	-	12.000	-	-	-	12.000	063	
1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	405	-	-	-	405	25 . 51	
	(25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)								
01	RM	-	405	-	-	-	405	063	
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	-	33.000	-	-	-	33.000	25 . 51	
	(25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)								
01	RM	-	33.000	-	-	-	33.000	063	
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	42.325	-	-	-	42.325	25 . 51	
	(25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2025

DS:5200-9881-3601-5128

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (25) PAPUA
Kode/Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	42.325	-	-	-	42.325	063@	
	JUMLAH	**-**	**87.730**	**-**	**-**	**-**	**87.730**		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.

Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:5200-9881-3601-5128

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (25) PAPUA
Kode/Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**539139**	**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	1.000	3.400	45.725	6.472	3.900	1.500	3.805	6.472	3.400	6.256	5.800	87.730
		BELANJA BARANG	0	1.000	3.400	45.725	6.472	3.900	1.500	3.805	6.472	3.400	6.256	5.800	87.730
	005.05.BF.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	0	1.000	3.400	45.725	6.472	3.900	1.500	3.805	6.472	3.400	6.256	5.800	87.730
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	1.000	3.400	45.725	6.472	3.900	1.500	3.805	6.472	3.400	6.256	5.800	87.730
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	1.745	20.819
		- PNBP (425232)	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	137	1.600
		- PNBP (425233)	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	278	3.270
		- PNBP (425239)	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.330	15.949

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.

Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2025
IV A. B L O K I R

DS:5200-9881-3601-5128

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [539139] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
539139	**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**				
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	21.113		
	52 Belanja Barang	Rp.	21.113		
005.05.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**				
1059	**Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara**				
1059.QCA	**Perkara Hukum Perseorangan**				
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	21.113		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2025
IV B. C A T A T A N

DS:5200-9881-3601-5128

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [539139] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775